

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis data, pengelolaan keuangan Dana Desa oleh Pemerintah Kampung Kuteni Reje Tahun 2022 dengan menggunakan empat indikator akuntabilitas dari Mardiasmo yaitu hukum dan kejujuran, proses, program dan kebijakan. Peneliti menyimpulkan pengelolaan Keuangan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung Kuteni Reje akuntabel.

- a. Variabel akuntabilitas kejujuran dan hukum, Pemerintah Kampung Kuteni Reje hukum pengelolaan keuangan Dana Desa tidak ditemukan penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran. Kegiatan pengelolaan keuangan Dana Desa yang dilakukan oleh aparatur Kampung Kuteni Reje sudah sesuai dengan hukum atau aturan yang ada. Aparatur Kampung Kuteni Reje bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Selain itu, tidak ditemukan juga penyalahgunaan kedudukan. Sehingga kegiatan yang telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Secara umum rencana pengelolaan keuangan Kampung Kuteni Reje telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Pertama, terdapat pasal 39 menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi. Tetapi pemerintah Kampung Kuteni Reje tidak ada menyampaikan informasi tersebut. Kedua, 32 ayat (3). Berdasarkan kebijakan tersebut, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) harus

disetujui bersama oleh BPBD pada bulan Oktober tahun berjalan. Namun, kesepakatan bersama Reje atau kepala desa dan Rakyat Genap Mupakat (RGM) atau BPD ditetapkan pada tanggal enam belas bulan Februari dua ribu dua puluh dua tahun berikutnya. Berdasarkan hasil wawancara, keterlambatan ini disebabkan oleh keterlambatan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan yang diterbitkan di akhir bulan Desember. Sehingga menyebabkan penundaan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK).

- b. Variabel akuntabilitas proses, Prosedur yang digunakan dalam mengelola keuangan Dana Desa sudah cukup baik. Aplikasi SISKEUDES memiliki tiga fungsi sekaligus dalam pengelolaan Dana Desa yaitu sebagai sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Dalam hal ini prosedur yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Prosedur ini digunakan untuk memudahkan Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan Dana Desa dalam mengelola keuangan Dana Desa dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan, sistem informasi yang digunakan untuk mengelola keuangan Dana Desa sesuai dengan prosedur yaitu menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES). Adanya aplikasi SISKEUDES membantu pemerintah Kampung Kuteni Reje dalam pengelolaan Dana Desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Seluruh data tersimpan di dalam aplikasi sehingga dipertanggungjawabkan.

- c. Variabel akuntabilitas program, pemerintah Kampung Kuteni Reje sudah mempertimbangkan tujuan yang ditetapkan agar dapat dicapai. Seluruh program sudah mencapai tujuan dengan mempertimbangkan tujuan yang ditetapkan pada proses perencanaan. Hal ini dapat dilihat sudah terlaksananya seluruh program kegiatan. Selain itu, pemerintah Kampung Kuteni Reje mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Dana Desa terdapat pergeseran anggaran karena ada penambahan belanja perlengkapan dan belanja tak terduga. Selain itu, mempertimbangkan biaya pelaksanaan dilakukannya survey harga oleh Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK). Adanya pergeseran anggaran menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBK). Pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung Kuteni Reje dibuat berdasarkan kepentingan masyarakat, yang dimana adanya program masyarakat ikut serta dalam proses pelaksanaan program dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Adanya program yang dibuat juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Dapat dilihat dari hasil wawancara dan data penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Kampung Kuteni Reje sebagai pelayan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

- d. Variabel akuntabilitas kebijakan, Pemerintah Kampung Kuteni Reje sudah melakukan dan menyampaikan laporan keuangan Dana Desa kepada Bupati Kabupaten Aceh Tengah melalui Camat Lut Tawar. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran tidak hanya disampaikan kepada pemerintah, pertanggungjawaban sudah disampaikan ke masyarakat. Hal ini sudah dilakukan oleh Pemerintah Kampung Kuteni Reje melalui media informasi dengan memasang baliho di depan gapura selamat datang Kampung Kuteni Reje. Namun berdasarkan temuan peneliti belum ada alamat pengaduan pada baliho. Sedangkan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, informasi paling sedikit memuat laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan. Pada pengelolaan Dana Desa di Kampung Kuteni Reje, peneliti menemukan tidak semua masyarakat memahami program Dana Desa.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa oleh Pemerintah Kampung Kuteni Reje Tahun 2022, maka peneliti memberikan saran untuk perbaikan akuntabilitas Pemerintah Kampung Kuteni Reje dalam pengelolaan Keuangan Dana Desa kedepannya. Adapun saran tersebut, ialah:

1. Meningkatkan integritas dan pengawasan khususnya dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam melakukan survey harga untuk menghindari adanya tindakan kerja sama dalam melakukan penyelewengan dana.
2. Sebaiknya Pemerintah Kampung Kuteni Reje meningkatkan kemampuan aparat Kampung terutama pada sistem informasi, agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi dan laporan terkait keuangan Dana Desa khususnya dengan memanfaatkan website dan media sosial lainnya serta menambahkan kelengkapan informasi yaitu alamat pengaduan.
3. Pemerintah Kampung Kuteni Reje sebaiknya meningkatkan kualitas pelayanan dengan membuat media berupa kotak saran/kritik agar masyarakat lebih mudah menuangkan aspirasinya. Selain itu, sebaiknya pemerintah Kuteni Reje membuat kotak kepuasan terhadap pelayanan program yang berfungsi untuk pengunjung atau masyarakat dapat menilai tingkat pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kampung Kuteni Reje.
4. Pemerintah Kampung Kuteni Reje sebaiknya melakukan sosialisasi dengan memberi edukasi terkait program Dana Desa dan penggunaan anggaran Dana Desa kepada masyarakat masyarakat sebagai bentuk keterbukaan. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya sekedar menerima informasi melalui pemasangan baliho sehingga masyarakat dapat mengkritisi penggunaan Dana Desa agar tidak terjadi kebocoran dalam pengelolaan keuangan Dana Desa

5. Sebaiknya pemerintah Kampung Kuteni Reje meningkatkan inovasi program untuk masyarakat.

